



Jateng
gayeng



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



**KANTOR KECAMATAN SALE
KABUPATEN REMBANG**

Tim Penyusun

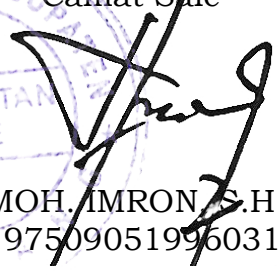
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Kecamatan Sale Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2024 ini mengacu pada Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2024, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan telah tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Camat Sale



MOH. IMRON S.H
NIP 197509051996031002

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1 LATAR BELAKANG 4

1.2 LANDASAN HUKUM 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IITAHUN 2024... 9

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 9

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 26

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.... 31

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAI PERUBAHAN RKPD..... 31

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 41

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 41

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN SALE 42

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 44

BAB IV PENUTUP..... 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran Periode 01 Januari 2024 - 30 Juni 2024 SKPD : 7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sale..... 10

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sale TW. II Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Rembang..... 12

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Periode 01 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024..... 22

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Triwulan II Tahun 2024..... 31

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang..... 33

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 Kabupaten Rembang..... 45

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025..... 49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPD-P) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Perubahan Rencana Kerja tahun 2024. Selanjutnya, Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Sale Tahun 2024 memuat Program/ kegiatan tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2025.

Selanjutnya, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sale Tahun 2024 ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif untuk tahun 2024, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-P SKPD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sale Tahun 2024 ini berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum atau Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung/ Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Maksud dari penyusunan Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sale yaitu meliputi urusan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana 2024 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sale untuk dimasukkan dalam dokumen KUPA-PPAS Tahun 2024 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

b. Tujuan :

Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah untuk:

- 1) Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025.
- 2) Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Kecamatan Sale.
- 3) Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

- 4) Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024

Bab IV PENUTUP

- 4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 4.3 Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN TAHUN
2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Sale pada Tahun 2024 telah melaksanakan 6 (enam) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sampai dengan triwulan II per 30 Juni 2024 sebagai berikut:

Belanja operasi total anggaran sebesar Rp 2.033.572.000,00 pada triwulan II ini telah teralisasi Rp 1.099.847.252,00. Belanja operasi tersebut terdiri dari Belanja pegawai anggaran Rp 1.851.743.000,00 terealisasi Rp 1.019.959.919,00 dan Belanja barang dan jasa anggaran Rp 181.829.000,00 terealisasi Rp 79.887.333,00.

Dari Laporan Realisasi Anggaran 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada Tahun 2024 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan per 30 Juni 2024 dengan Belanja Operasi sebesar 54,08%. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sale per 30 Juni 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Anggaran
Periode 01 Januari 2024 - 30 Juni 2024
SKPD : 7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sale

No. Urut	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
5	BELANJA DAERAH	2.033.572.000.00	1.099.847.252.00	933.724.748.00	54.08
5.1	BELANJA OPERASI	2.033.572.000.00	1.099.847.252.00	933.724.748.00	54.08
5.1.01	Belanja Pegawai	1.851.743.000.00	1.019.959.919.00	831.783.081.00	55.08
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.829.000.00	79.887.333.00	101,941,667.00	43.94
5.2	BELANJA MODAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Belanja	2.033.572.000.00	1.099.847.252.00	933.724.748.00	54.08
	Surplus / Defisit	(2.033.572.000.00)	(1.099.847.252.00)	(933.724.748.00)	54.08

Tabel 2.1.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sale TW. II Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Rembang

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW. II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah TW. II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1			KECAMATAN									
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Sale	65	69,50	70	69,50	99,29%	69,50		0
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95%	100%	95%	0,00%	0,00%	95%	42%	226%
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2		0,00%	2 dok	0,00%	
7	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3		0,00%	3 dok	0,00%	
7	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4		0,00%	4 dok	10,5%	
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	95%	98.84%	95%	98.84%	104,04%	95%	65,88%	69,35%
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12		0,00%	12 bln		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			19		0,00%	19 orang	64,47%	
7	1	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10		0,00%	10 dok	33,80%	
7	1	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang disusun tepat waktu			1		0,00%	1 dok	0,00%	
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%		95%		0,00%	95%	0.00	0,00%
7	1	1	2.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	% Dokumen Pendataan Kepegawaian yang dikelola dengan baik			17		0,00%	17 orang	0.00	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan	95%	97,75%	95	97,75%	103%	95%	32,38%	34,08%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW. II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah TW. II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
				Umum								
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		0,00%	1 paket	40,20%	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		0,00%	1 paket	38,92%	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		0,00%	1 paket	31,40%	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		0,00%	1 paket	54,02%	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Pemenuhan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12		0,00%	12 bulan	0	
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1		0,00%	1 paket	47,03%	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10		0,00%	12 bulan	22,43%	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	95%	65%	0,00%		89,17%	93,86%
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3		0,00%		89,17%	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	92.95%	97.84	95%	54,16%	57,01%
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9		0,00%	9 laporan	15	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		0,00%	12 bulan	48,96%	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4		0,00%	12 bulan	55,35%	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	95%	94.71%	99,69%	95%	47,59%	50,09
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17		0,00%	17 unit	49,93%	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7		0,00%	7 unit	0,00%	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW. II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah TW. II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
7 1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik			1		0,00%	1 kegiatan	0,00%	
7 1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke camat	95%	100%	95%	100%	105,26%	95%	10,44%	10,99%
7 1 2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	95%		95%		0,00%	95%	0,00%	0,00%
			Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1		0,00%	1 kegiatan	0,00%	
7 1 2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	95%					95%	16,73%	17,61%
7 1 2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1 kegiatan	16,73%	
7 1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat	100%	98%	95%	98%	103,16%	95%	42,71%	42,71%
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	15 desa		10		0,00%			
7 1 3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu, Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	98.93%	95%	98.93%	104,14%	95%	42,71%	42,71%
7 1 3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			7		0,00%	7 lembaga masyarakat	87,77%	0,00%
7 1 3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12		0,00%	12 laporan	19,40%	0,00%
7 1 3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		95%					95%		0,00%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW. II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah TW. II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
7132032	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	% lembaga kemasyarakatan desa yang aktif			15		0,00%	15 desa		0,00%
714	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	95%	100%	95	100%	105%	95%	0,00%	0,00%
714201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95%	100%	95%	100%	105,26%	95%	0,00%	0,00%
7142011	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12		0,00%	12 bulan	0,00%	0,00%
714202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	% Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	95%				0,00%	95%		0,00%
7142021	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	% Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)			1		0,00%	1 kegiatan		0,00%
715	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	95%	100%	105,26%	100%	0,00%	0,00%
715201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	95%	100%	105,26%	100%	0,00%	0,00%
7152011	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			600		0,00%	600 orang	0,00%	0,00%
716	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	100%	95%	100%	105,26%	95%	1,68%	1,77%
716201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Rata-rata IKM Desa	95%	100%	70%	100%	142,86%	95%	1,68%	1,77%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW. II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah TW. II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
				Pemerintahan Desa								
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9		0,00%	9 dokumen		
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3		0,00%	3 dokumen		
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	% Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	1		0,00%	1 kegiatan		
7	1	6	2.01	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	% Pemenuhan jabatan Kades dan Perangkat Desa	1		0,00%	1 kegiatan		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12		0,00%	1 kegiatan	25	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19		0,00%			
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10		0,00%			
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang disusun tepat waktu	1		0,00%	63		0
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%	95%	0,00%	95%	4,2%	4,42%
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	% Dokumen Pendataan Kepegawaian yang dikelola dengan baik	17		0,00%	2 dok	0	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	95%	97,75%	1.03	3 dok	0	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		0,00%	4 dok	10,5%	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		0,00%	95%	65,88%	69,35%
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		0,00%	12 bln		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1		0,00%	19 orang	64,47%	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Pemenuhan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12		0,00%	10 dok	33,80%	

Tabel 2.2:
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Sale Kabupaten Rembang
Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja TW. II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024				Anggaran dan Realisasi Keuangan TW. II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja TW. II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi TW. II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)		
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100		
7			UNSUR KEWILAYAHAN							
7 1			KECAMATAN							
7 1 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Sale	60	69,50	115,83%	2.014.849.500,00	873.880.518,00	43,37%
7 1 1 2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95,00%	0,00%	0,00%	25.000.000,00	0,00	0,00%
7 1 1 2.01 1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72,00%	0,00%	0,00%	15.000.000,00	0,00	0,00%
7 1 1 2.01 2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
7 1 1 2.01 7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	0,00%	0,00%	10.000.000,00	0,00	0,00%
7 1 1 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	92,00%	46,38%	50,00%	1.794.786.500,00	832.386.462,00	46,38%
7 1 1 2.02 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92,00%	47,02%	51,00%	1.720.786.500,00	809.066.462,00	47,02%
7 1 1 2.02 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%	33,80%	34,00%	69.000.000,00	23.320.000,00	33,80%
7 1 1 2.02 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang disusun tepat waktu	100,00%	0,00%	0,00%	5.000.000,00	0,00	0,00%
7 1 1 2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian						
7 1 1 2.05 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	% Dokumen Pendataan Kepegawaian yang dikelola dengan baik						
7 1 1 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	95,00%	14,83%	16,00%	75.000.000,00	11.122.900,00	14,83%
7 1 1 2.06 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%	26,00%	26,00%	2,000,000	510,000	26%
7 1 1 2.06 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	8,92%	9,00%	5.000.000,00	446.000,00	8,92%
7 1 1 2.06 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	15,40%	15,00%	25.000.000,00	3.850.000,00	15,40%
7 1 1 2.06 5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	30,88%	31,00%	5.000.000,00	1.544.000,00	30,88%
7 1 1 2.06 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Pemenuhan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja TW. II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024				Anggaran dan Realisasi Keuangan TW. II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja TW. II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi TW. II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)		
1	2			4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100		
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%	27,03%	27,00%	10.000.000,00	2.702.900,00	27,03%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91%	9,21%	10,00%	28.000.000,00	2.580.000,00	9,21%
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur						
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	25,44%	28,00%	105.360.000,00	26.799.656,00	25,44%
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	15,00%	15,00%	1.200.000,00	180.000,00	15,00%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	95%	17,33%	18,00%	12.000.000,00	2.079.656,00	17,33%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	95%	26,63%	28,00%	92.160.000,00	24.540.000,00	26,63%
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	85%	24,29%	29,00%	14.703.000,00	3.571.500,00	24,29%
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85%	25,49%	30,00%	14.013.000,00	3.571.500,00	25,49%
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00%	0,00%	0,00%	690.000,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke camat	100,00%	0,00%	0,00%	28.730.000,00	0,00	0,00%
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100,00%	0,00%	0,00%	10.800.000,00	0,00	0,00%
					Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	0,00%	0,00%	10.800.000,00	0,00	0,00%
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	95,00%	0,00%	0,00%	17.930.000,00	0,00	0,00%
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	95,00%	0,00%	0,00%	17.930.000,00	0,00	0,00%
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat	100,00%	36,03%	36,00%	89.918.400,00	32.400.000,00	36,03%
						Jumlah desa dengan swadayamasyarakat ≥ Rp 20.000.000,-						
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ	100,00%	36,03%	36,00%	89.918.400,00	32.400.000,00	36,03%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja TW. II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024				Anggaran dan Realisasi Keuangan TW. II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024					
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja TW. II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi TW. II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)				
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100				
		Tepat Waktu, Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola										
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100,00%	87,77%	88,00%	30.650.000,00	26.900.000,00	87,77%
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	95,00%	9,28%	10,00%	59.268.400,00	5.500.000,00	9,28%
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	% lembaga kemasyarakatan desa yang aktif						
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100,00%	0,00%	0,00%	45.000.000,00	0,00	0,00%
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	0,00%	0,00%	45.000.000,00	0,00	0,00%
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100,00%	0,00%	0,00%	45.000.000,00	0,00	0,00%
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	% Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)						
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	% Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)						
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00%	0,00%	0,00%	28.050.000,00	0,00	0,00%
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	0,00%	0,00%	28.050.000,00	0,00	0,00%
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100,00%	0,00%	0,00%	28.050.000,00	0,00	0,00%
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	100,00%	1,68%	2,00%	74.317.500,00	1.250.000,00	1,68%
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	100,00%	1,68%	2,00%	74.317.500,00	1.250.000,00	1,68%
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	100,00%	0,00%	0,00%	20.000.000,00	0,00	0,00%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja TW. II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024				Anggaran dan Realisasi Keuangan TW. II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja TW. II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi TW. II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)	
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100	
		Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
7	1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100,00%	0,00%	0,00%	34.317.500,00	0,00	0,00%
7	1 6 2.01 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						
7	1 6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	% Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	100,00%	0,00%	0,00%	10.000.000,00	0,00	0,00%
7	1 6 2.01 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	% Pemenuhan jabatan Kades dan Perangkat Desa	100,00%	0,00%	0,00%	5.000.000,00	0,00	0,00%

Untuk hasil Realisasi Kinerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, meliputi 4 (empat) program yang terdiri dari:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 1.962.484.500,00, pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 1.072.868.252 ,00 atau sebesar 54,67%.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, anggaran sebesar Rp 22.632.300,00 pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 7.339.000,00 atau 32,43%.
- c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, anggaran sebesar Rp 36.500.000,00 pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 19.640.000,00 atau 53,81%.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, anggaran sebesar Rp 11.955.200,00 pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

1. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/ Kegiatan

Dalam penyelenggaraan Kinerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target Kinerja Program/Kegiatan, antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.851.743.000,00 pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.019.959.919,00 atau 55,08%. Kegiatan tersebut terdiri dari;
 - a) sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 1.782.423.000 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 984.979.919,00 atau 55,26% dan;
 - b) sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD anggaran

sebesar Rp 69.320.000,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 34.980.000,00 atau 50,46%.

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 31.351.500,00 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 21.198.636,00. atau 67.62%. Kegiatan tersebut terdiri dari;

- a) sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 2.059.000,00 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 2.050.000,00 atau 99,56%;
- b) sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga anggaran sebesar Rp 2.955.600,00 pada triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 2.950.000,00 atau 99,81%;
- c) sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor anggaran Rp 7.500.000,00 pada triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 7.200.000,00 atau 96,00%
- d) sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan anggaran Rp 4.448.900,00 pada triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 1.923.636,00 atau 43,24%
- e) sub kegiatan penyediaan bahan/material anggaran Rp 7.888.000,00 pada triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 2.525.000,00 atau 32,01%
- f) sub penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD anggaran Rp 6.500.000,00 pada triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 4.550.000,00 atau 70,00%.

- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 79.390.000,00 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 31.709.697,00 atau 39,94%. Kegiatan tersebut terdiri dari;
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat anggaran Rp 1.200.000,00 pada triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik anggaran Rp 11.000.000,00 pada triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 3.944.697,00 atau 35,86%
 - c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor anggaran Rp 67.190.000,00 pada triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 27.765.000,00 atau 41,32%
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
 - 1) Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan anggaran sebesar Rp 22.632.300,00 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 7.339.000,00. Kegiatan tersebut terdiri dari;
 - a) sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa anggaran sebesar Rp 15.262.600,00 pada triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 6.249.000,00 atau 40,94%;
 - b) sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan anggaran sebesar Rp 7.369.700,00 pada triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 1.090.000,00 atau 14,79%.

c. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp 36.500.000,00 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 19.640.000,00. Kegiatan tersebut terdiri dari;

a) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 36.500.000,00 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 19.640.000,00 atau 53,81%.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp 11.955.200,00 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 0,00. Kegiatan tersebut terdiri dari;

b) Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 11.955.200,00 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Target kinerja program/kegiatan keuangan Kecamatan Sale pada triwulan I 2024 telah tercapai sesuai dengan serapan sebesar 54,08%.

2. Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran triwulan I, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang masuk dalam kategori baik, begitu pula dengan penyerapan anggaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang telah mencapai 54,08%. Oleh karena itu, Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Perangkat Daerah tercapainya target kinerja pada triwulan I dan terus melakukan perbaikan untuk dapat melewati target capaian triwulan II.

3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Arah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk mengatasi faktor-faktor penyebab hasil capaian target kinerja program/kegiatan adalah :

Tabel. 2.1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Periode 01 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024

No. Urut	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi	%	Realisasi 2023
5	BELANJA DAERAH	2.033.572.000.00	1.099.847.252.00	54.08	1.796.492.634,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.033.572.000.00	1.099.847.252.00	54.08	1.796.492.634,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.851.743.000.00	1.019.959.919.00	55.08	1.579.645.578,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.829.000.00	79.887.333.00	43.94	206.147.056,00
	Jumlah Belanja Operasi	0.00	0.00	54,08	1.785.792.634,00
5.2	BELANJA MODAL	0.00	0.00	0.00	10.700.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	10.700.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Belanja	2.033.572.000.00	1.099.847.252.00	54.08	1.796.492.634,00
	Surplus / Defisit	(2.033.572.000.00)	(1.099.847.252.00)	54.08	(1.796.492.634,00)

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas, kondisi tersebut sangat erat dengan keberadaan Kecamatan Sale yang merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Secara kelembagaan dan struktur organisasi di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang, ditinjau dari cakupan bidang tugas dan fungsinya bahwa Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal Kabupaten Rembang masih terdapat Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong bagi Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Faktor *penghambat* dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang antara lain :

1. Masih rendah akurasi data perencanaan karena kompleksitas data perencanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan;
2. Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk kajian dan identifikasi perencanaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim;
3. Keterbatasan waktu di dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan juga keterbatasan SDM yang profesional dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rembang.

Sedangkan faktor *pendorong* Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk mencapai tujuan, sasaran dan target untuk 5 tahun mendatang antara lain:

1. Tersedianya perangkat TIK yang mendukung peningkatan kinerja
2. Melakukan validasi data untuk meningkatkan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
3. Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan

kuantitas data/informasi untuk keperluan kajian dan identifikasi perencanaan pembangunan.

4. Adanya usaha untuk menemukan model dan pendekatan dalam Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta dinamika sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang
5. Usaha untuk melakukan efisiensi waktu proses perencanaan pembangunan daerah dan juga mengefektifkan pemanfaatan tenaga profesional perencanaan pembangunan di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang melalui pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan Sale sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Capaian indikator kinerja Nilai SKM Kecamatan Sale pada triwulan II tahun 2023 sebesar 95,75%, capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 86,00%. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

b. Nilai SAKIP

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kecamatan Sale sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 yaitu Nilai SAKIP.

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Sale pada triwulan II tahun 2023 masih belum dirilis oleh Tim Evaluasi SAKIP Kabupaten Rembang sehingga capaian ini masih belum diketahui terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 69,11%.

c. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi.

Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.

Kecamatan Sale sebagai salah satu perangkat daerah juga menetapkan Nilai RB sebagai salah satu indikator kinerja sebagaimana tertuang didalam dokumen Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja Nilai RB Kecamatan Sale pada triwulan II tahun 2023 sebesar 33,99%, capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 27,22%. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

d. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (excellent service) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, diperlukan penilaian terhadap instansi pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) serta pemerintah daerah yang selama ini telah dilakukan oleh Kemen PAN RB. Kementerian PAN-RB melaksanakan penilaian dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Berdasarkan Permenpan RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan

untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Kecamatan Sale sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Capaian indikator kinerja IPP Kecamatan Sale pada triwulan II tahun 2023 sebesar 3,51%, capaian ini belum melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 4,51%. Ketidaktercapaian kinerja ini diperlukan review terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

e. Persentase Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, penyerapan anggaran adalah salah satu indikator dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilakukan suatu pemerintahan.

Tidak hanya dari sisi dampak atas kinerja program/kegiatan atau outcome, penyerapan anggaran berupa output merupakan salah satu kunci keberhasilan ketercapaian kinerja pemerintah daerah termasuk Kecamatan Sale sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi tersebut.

Capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Kecamatan Sale pada triwulan II tahun 2024 sebesar 98,67%, capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

f. Persentase Permasalahan Trantibum yang Difasilitasi

Kinerja sasaran dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sale diukur dengan persentase permasalahan trantibum yang difasilitasi, indikator kinerja ini salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilakukan suatu pemerintahan khususnya unsur wilayah seperti Kecamatan Sale.

Capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Kecamatan Sale pada triwulan tahun 2024 sebesar 100%, realisasi ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

Guna mengetahui gambaran kinerja perangkat daerah Kecamatan Sale secara keseluruhan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3:
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sale
 Kabupaten Rembang
 Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Renstra 2020-2021									
1	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Na				Na				
2	IKM Kecamatan Sale	84				84				
3										
4										
	Renstra 2021-2026									
1	Indeks Pelayanan Publik / IPP		3.1	3.2	3.3		3.1	3.2	3.3	
2	IKM Kecamatan Sale		85	85	86		86	85	86	
3										
4										

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sale dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sale yang merupakan isu strategis sesuai dokumen Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026.

2.4. Review terhadap Rancangan Awai Perubahan RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Sale tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar Kecamatan Sale.

Tabel 2.4:
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2,050,878,556	UNSUR KEWILAYAHAN				2,050,878,556		
7	01				KECAMATAN				2,050,878,556	KECAMATAN				2,050,878,556		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sale	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sale	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sale	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1,050,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sale	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1,050,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sale	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1,720,786,500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sale	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1,720,786,500		

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait				dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sale	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	68,820,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sale	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	68,820,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sale	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sale	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,804,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,804,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,240,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,240,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan	14,850,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	Meningkatnya Efektifitas	14,850,000	

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1					2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
							Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,961,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,961,000			
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,998,900	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,998,900			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11,530,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11,530,000			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
7	01	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,700,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,700,000			
7	01	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00			

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kecamatan					Kecamatan			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,200,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,323,656	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,323,656	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	92,160,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	92,160,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7	01	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7,871,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7,871,500	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	0,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	0,00	

Kode						Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
7	01	02	2.02	02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0,00	
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,925,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,925,000	
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
7	01	02	2.04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sale	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11,425,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sale	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11,425,000	

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1					2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sale	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26,900,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sale	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26,900,000			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19,406,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19,406,000			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN						

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					PEMERINTAHAN UMUM						PEMERINTAHAN UMUM					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sale	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25,750,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sale	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25,750,000		
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Sale	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0,00	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Sale	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0,00		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan	Kec.	Jumlah Dokumen	Terlaksananya	0,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan	Kec.	Jumlah Dokumen	Terlaksananya	0,00		

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1					2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
					Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sale	yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sale	yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,727,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,727,000			
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sale	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sale	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0,00			
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,200,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,200,000			
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00			

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,000		
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,00		
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00		
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1,250,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1,250,000		
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kec. Sale	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0,00		
					Jumlah				2,050,878,556					2,050,878,556		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Namun seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja-PD, yang telah disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif, perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, teknokratik, partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan- kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur dan reformasi birokrasi berdampak sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sale

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

a. Tujuan

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I: “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Kabupaten yakni “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”.

Dalam konteks kecamatan berdasarkan sasaran daerah maka dirumuskan tujuan kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Sedangkan sasaran Kecamatan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Dimana indikator sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

Dalam hal ini Kecamatan Sale Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Sale yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga

ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

b. Sasaran:

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sale Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Sale dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Sale selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tahun 2016–2026 dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.2:
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Kecamatan Sale	Program Keuangan dan Kepegawaian	Nilai SAKIP Kecamatan Sale	%	55	60,20	69,50	70,00			
			Nilai Indeks Inovasi Daerah	%							
2	Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Pelayanan Publik	Nilai IPP Kecamatan Sale	%	3.0	3.1	3.2	3.5			
3	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pelayanan Publik	Nilai IKM Kecamatan Sale	%	81	84	86	86			
4	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Pelayanan Publik		%							

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang akan menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/material
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des

- a) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- c) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- e) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Tabel 3.2:
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sale

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2,050,878,556				3,683,000,00
7	01				KECAMATAN				2,050,878,556				3,683,000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Sale		70 Angka				80 Angka	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100%				100%	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sale	4 Dokumen	0,00	DAU	Prioritas	4 Dokumen	20.000.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sale	4 Dokumen	1,050,000	DAU	Prioritas	4 Dokumen	20.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		95 %				95 %	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sale	17 Orang/bulan	1,720,786,500	DAU	Prioritas	17 Orang/bulan	2.000.000.000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sale	25 Dokumen	68,820,000	DAU	Prioritas	25 Dokumen	80,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sale	1 Dokumen	0,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	15,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum		100%				100%	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Sale	12 Paket	1,804,000	DAU	Prioritas	12 Paket	10,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Sale	12 Paket	4,240,000	DAU	Prioritas	12 Paket	10,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Sale	12 Paket	14,850,000	DAU	Prioritas	12 Paket	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7`01`01`2.0`05`6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Sale	12 Paket	4,961,000	DAU	Prioritas	12 Paket	30,000,000
7`01`01`2.0`07`6	Penyediaan Bahan/Material				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Sale	12 Paket	9,998,900	DAU	Prioritas	12 Paket	30,000,000
7`01`01`2.0`09`6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	11,530,000	DAU	Prioritas	12 Laporan	50,000,000
7`01`01`2.07`07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur		100%				100%	
7`01`01`2.07`7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Sale	17 Unit	10,700,000	DAU	Prioritas	17 Unit	150,000,000
7`01`01`2.07`7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Sale	2 Unit	0,00	DAU	Prioritas	2 Unit	10,000,000
7`01`01`2.08`08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%				100%	
7`01`01`2.08`8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sale	12 Laporan	1,200,000	DAU	Prioritas	12 Laporan	3,000,000
7`01`01`2.08`8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Sale	12 Laporan	9,323,656	DAU	Prioritas	12 Laporan	15,000,000
7`01`01`2.08`8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Sale	12 Laporan	92,160,000	DAU	Prioritas	12 Laporan	100,000,000
7`01`01`2.09`09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				% BDM Dengan Kondisi Baik		100%				100%	
7`01`01`2.09`9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Sale	17 Unit	7,871,500	DAU	Prioritas	17 Unit	20,000,000
7`01`01`2.09`9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	0,00	DAU	Prioritas	15 Unit	15,000,000
7`01`02`2.02`02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat		100%				100%	
7`01`02`2.02`02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja				% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%				100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
7	01	02	2.0 2	02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	4 Laporan	0,00	DAU	Prioritas	4 Laporan	50,000,000
7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	1 Laporan	2,925,000	DAU	Prioritas	1 Laporan	15,000,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB		100%				100%	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sale	1 Laporan	11,425,000	DAU	Prioritas	1 Laporan	30,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp 20.000.000,- Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat		15 Desa 100%				15 Desa 100%	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		100%				100%	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sale	5 Lembaga Kemasyarakatan	26,900,000	DAU	Prioritas	5 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	6 Laporan	19,406,000	DAU	Prioritas		70,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%				100%	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum		100%				100%	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sale	3 Laporan	0,00	DAU	Prioritas		95,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	05			Kecamatan								
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%				100%	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan		100%				100%	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sale	300 Orang	25,750,000	DAU	Prioritas	300 Orang	45,000,000
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Sale	40 Orang	0,00	DAU	Prioritas	40 Orang	30,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik		100%				100%	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa		86 Angka				86 Angka	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Sale	15 Desa	0,00	DAU	Prioritas	15 Desa	30,000,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Sale	15 Desa	0,00	DAU	Prioritas	15 Desa	95,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Sale	15 Desa	2,727,000	DAU	Prioritas	15 Desa	40,000,000
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kec. Sale	15 Desa	0,00	DAU	Prioritas	15 Desa	30,000,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan	Kec.	15 Desa	1,200,000	DAU	Prioritas	15 Desa	25,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				1		Kepala Desa dan Perangkat Desa	perangkat desa	Sale						
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Kec. Sale	15 Desa	0,00	DAU	Prioritas	15 Desa	25,130,600	
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kec. Sale	15 Desa	0,000	DAU	Prioritas	15 Desa	10,000,000	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Sale	15 Desa	0,00	DAU	Prioritas	15 Desa	25,130,600	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kec. Sale	15 Desa	0,00	DAU	Prioritas	15 Desa	25,130,600	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kec. Sale	15 Desa	1,250,000	DAU	Prioritas	15 Desa	10,000,000	
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga	Kec. Sale	15 Desa	0,00	DAU	Prioritas	15 Desa	25,130,600	
					Jumlah				2,050,878,556				3,683,000,00	

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sale Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada Tahun 2024, menjadi sebesar Rp. 1,959,295,556 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*). Anggaran Kecamatan Sale dipergunakan untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sale pada triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 serta menunjang Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu Tujuan : Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Sasaran : Kecamatan Sale sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 yaitu Nilai SAKIP.

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Sale pada triwulan II tahun 2024 masih belum dirilis oleh Tim Evaluasi SAKIP Kabupaten Rembang sehingga capaian ini masih belum diketahui terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 69,50%..

Jika ketersediaan anggaran tersebut diatas berkurang atau tidak sesuai dengan Rencana Kerja semula maka anggaran akan diprioritaskan pada program/kegiatan yang menunjang langsung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sale dan Pemerintah

Daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Sale dan RPJMD Kabupaten Rembang.

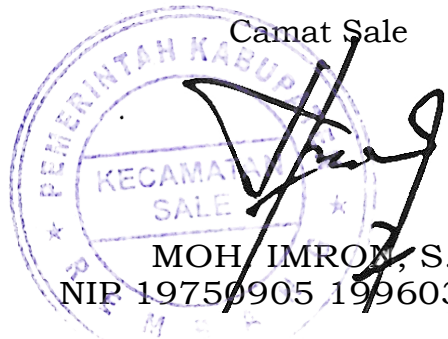
Sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Kecamatan Sale Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA P) Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Aksi Kinerja pada Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 11 Oktober 2024

Camat Sale



MOH/ IMRON, S.H
NIP. 19750905 199603 1 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

Kunci sukses untuk mencapai tujuan adalah perencanaan yang baik. Perencanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Kecamatan Sale sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan kekuasaan kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Disamping itu, sesuai Permenpan RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Terkait dengan anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, penyerapan anggaran adalah salah satu indikator dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilakukan suatu pemerintahan.